



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 22 Mei 2017

Halaman: 19

Kawal Kebijakan Lima Tahun

FACHRUDIN, ketua tim pemenang HS-HP dalam Pemilihan Wali Kota Jogja 2017, meminta dua tokoh yang diusungnya segera menuntaskan pembagian kerja antara wali kota dan wakil wali kota. Ditegaskan, pembagian tugas harus jelas karena hal itu menjadi salah satu kunci sukses roda pemerintahan lima tahun ke depan. "Jangan seperti periode lalu. Pembagian tugas harus klar sejak awal," ingatnya.

Penataan internal birokrasi menjadi sorotan Fachrudin selanjutnya. Itu demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. "Pak HS-HP harus mulai melakukan penataan, terutama sektor yang menjadi penyangga suksesnya komitmen visi misi mereka. Jangan sampai ada kendala di dalam (pemerintahan) yang tidak sinkron," pintanya.

Fachrudin menyatakan, keberhasilan mengusung HS-HP hingga duduk di kursi tertinggi Pemkot Jogja bukanlah langkah final. Dia bertekad tetap mengawal semua kebijakan mereka. Sekaligus membuktikan komitmen dalam upaya menyejahterakan masyarakat. "Ini bukan seperti panitia manten yang setelah selesai bubar. Kami akan kawal terus," ucapnya.

Harapan serupa demi kemajuan Kota Jogja disampaikan sejumlah tokoh publik. Ahmad Syauqi Soeratro, salah seorang

kader Muhammadiyah, berpesan agar HS-HP amanah terhadap masyarakat. Menurutnya, Kota Jogja harus kembali kepada ruh-nya, bukan hanya sebagai kota yang nyaman dalam kesejahteraan warganya. Tapi lebih dari itu, bisa kembali menjadi kota yang menginspirasi Indonesia. Bahkan dunia. "Mangga dibangun ruang perubahan yang diisi dengan dialog hangat melibatkan warga. Gagasan positif harus diwujudkan demi kemajuan kota," ujarnya.

Mantan Wali Kota Jogja Herry Zudianto lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsi kepala daerah sebagai abdi negara. "Selamat bekerja dengan memaknai kekuasaan sebagai wakaf politik untuk menjadi kepala pelayan publik Kota Jogja," pesannya untuk HS-HP.

Sedangkan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Dji Syukri Fadholi mewanti-wanti seluruh terlintik untuk memenuhi kewajiban dan janji-janji saat kampanye.

Dikatakan, secara hakekat ada tiga hal utama yang harus dijalani pejabat dalam pelaksanaan amanah rakyat. Pertama, menjadikan jabatan sebagai sarana pengabdian kepada Tuhan dan rakyat yang dipimpin. Kedua, kewajiban menegakkan aturan hukum atas dasar moral dan kejujuran sosok pemimpin. Dan ketiga, segala kebijakan kepala daerah harus berorientasi sepenuhnya untuk rakyat. (pra/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005